

Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Pidie

Yuni Jafriany¹, Musdiani¹, Rita Novita¹

¹Universitas Bina Bangsa Getsempena, Aceh, Indonesia

ABSTRACT

Purpose – This research aims to analyze the needs of elementary school supervisors in Pidie District and to develop strategies to enhance their competence.

Method – The research method utilizes a qualitative descriptive approach through interviews, observations, and documentary studies. The results indicate deficits in supervision and insufficient competence. Recommendations include increasing the number of supervisors and providing further training. This study is expected to enhance the quality of elementary education supervision in Pidie.

Findings – The research findings indicate a deficit in the number of supervisors and insufficient competence in Kabupaten Pidie. The proposed recommendations include increasing the number of supervisors and implementing advanced training programs. Through these efforts, it is hoped that this study can significantly contribute to enhancing the quality of supervision in basic education in Pidie, thereby improving overall teaching and school management processes.

Research Implications – The research improves supervision quality by pinpointing ineffective areas needing enhancement. Tailoring resources to specific needs optimizes supervisor numbers and task distribution for better outcomes. Findings also inform enhanced education policies for elementary school management and supervision. However, challenges unique to Kabupaten Pidie require a nuanced, contextual approach beyond general analyses.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 04-06-2024

Revised: 25-06-2024

Accepted: 30-06-2024

KEYWORDS

development,
academic supervision,
elementary school,
supervisory needs

Corresponding Author:

Yuni Jafriany

Universitas Bina Bangsa Getsempena, Aceh, Indonesia
Jalan Tanggul Krueng Lamnyong Rukoh Kota Banda Aceh
Email: yuni.sigli652@gmail.com

Pendahuluan

Pendidikan berperan penting dalam kemajuan suatu negara. Salah satu aspek yang sering menjadi fokus dalam mempengaruhi kualitas pendidikan adalah peran pengawas sekolah. Penelitian (Sariakin et al., 2023) menemukan bahwa pelaksanaan supervisi akademik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan kinerja guru. Untuk bisa melakukan ini, maka perlu dilakukan perencanaan yang baik. (Husaini Usman, 2019) menyatakan bahwa perencanaan organisasi kritis untuk mengatur keberadaan saat ini dan masa depannya. Perencanaan SDM menangani pegawai yang tersedia, baik dari segi kualitas (seperti kompetensi, pengalaman, dan level jabatan) maupun kuantitas (jumlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh organisasi). Menurut (Nur Aedi, 2018), perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan. Sedangkan (Sondang Siagian, 2016) menjelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat, jenis tenaga kerja yang tepat, melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan dilaksanakan pada saat yang tepat. Dalam hal ini, pengawas berperan penting di dalamnya.

Pengawas sekolah berperan strategis dalam mengelola hubungan antara sekolah dengan masyarakat, berada di posisi tengah antara kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah (Wiratman, 2021). Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan kurikulum, penilaian, dan kegiatan pendidikan lainnya. Kehadiran pengawas yang cukup dan berkualitas di Kabupaten Pidie menjadi krusial karena mereka tidak hanya memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai standar, tetapi juga memberikan bimbingan dan saran kepada guru untuk meningkatkan metode pengajaran dan pembelajaran. Kekurangan pengawas dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan yang efektif, sehingga potensi masalah dalam sistem pendidikan sulit untuk diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Dengan adanya jumlah pengawas yang memadai dan kompeten, diharapkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pidie dapat meningkat secara signifikan, menghasilkan generasi penerus yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan responden Sekretaris Dinas pendidikan Kabupaten Pidie pada Bulan September 2023 yang lalu, diperoleh informasi bahwa masih banyak permasalahan dalam bidang kepengawasan, di antaranya yaitu belum terpenuhinya rasio pengawas sekolah pada jenjang SD. Menurut PPNo.74/2008 dalam (Mulyasa, 2017), rasio pengawas SD adalah 1 orang pengawas untuk 10 sekolah. Artinya seorang pengawas SD harus membina 10 satuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, komposisi pengawas SD seharusnya 2 tim pengawas sekolah yang dibutuhkan untuk jenjang SD di Kabupaten Pidie dengan rincian untuk 10 sekolah dasar dibina oleh 1 orang pengawas dan ditambah 1 orang pengawas BK masing-masing dalam 1 tim.

Dengan demikian jumlah pengawas yang dibutuhkan untuk setiap 10 sekolah berjumlah 2 orang pengawas. Selanjutnya, proporsi pengawas sekolah di Kabupaten Pidie berdasarkan jabatan/golongan belum menunjukkan jumlah yang ideal.

Proporsi kebutuhan pengawas sekolah berdasarkan jabatan/golongan akan membantu menempati jabatan pengawas sebagai pengawas sekolah muda/madya/utama, hal ini perlu dilakukan agar jumlah pengawas sekolah tidak terkonsentrasi pada kelompok jabatan tertentu (Sudjana, 2017). Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang analisis kebutuhan pengawas tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pidie. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sering kali hanya mencatat kebutuhan secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih terperinci dan menyeluruh untuk mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Dengan analisis mendalam, penelitian ini tidak hanya mengungkap kekurangan jumlah pengawas dan distribusi tugas, tetapi juga menyoroti faktor-faktor kontekstual yang spesifik bagi Kabupaten Pidie yang dapat memengaruhi implementasi pengawasan. Selain itu, penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang lebih spesifik dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pengawasan sekolah dasar. Rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan pendidikan yang lebih efektif di daerah ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wawasan teoretis tentang pengawasan pendidikan di tingkat lokal, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi langkah-langkah praktis dalam memperbaiki sistem pengawasan pendidikan di Kabupaten Pidie.

Ketidakseimbangan proporsi pengawas sekolah di Kabupaten Pidie, dengan hanya 22% dari mereka berada dalam kategori muda (golongan III/d) dan sisanya 78% dalam kategori madya (golongan IV/a), tanpa ada yang berada dalam kategori utama, dapat berdampak terhadap kinerja pengawas dan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Pengawas sekolah memiliki tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan jabatan dan golongan mereka, sehingga proporsi yang tidak seimbang ini dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara tugas yang diemban dan tingkat pengalaman serta keterampilan yang dimiliki. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk melakukan pemetaan kebutuhan pengawas sekolah secara menyeluruh untuk jangka waktu mendatang. Studi ini dapat membantu menentukan jumlah yang tepat dan distribusi pengawas sekolah berdasarkan kebutuhan aktual di setiap tingkatan, sehingga memastikan bahwa setiap pengawas memiliki kapasitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pengawasan dan pendidikan di Kabupaten Pidie secara keseluruhan (Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, 2023).

Penelitian tentang analisis kebutuhan pengawas tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pidie memiliki urgensi yang besar dalam konteks meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Dengan memahami secara mendalam kebutuhan akan pengawas sekolah dasar, penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas untuk optimalisasi

sumber daya manusia pendidikan. Hal ini termasuk dalam penempatan yang tepat dari pengawas yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk mengatasi tantangan pengawasan pendidikan di tingkat dasar, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pidie.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan fenomena atau kejadian dalam konteks alami tanpa campur tangan peneliti. Metode ini menyoroti interpretasi mendalam dari data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumen untuk memahami konteks dan signifikansi dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang persepsi, sikap, dan pengalaman individu atau kelompok terkait topik penelitian, yang dapat menghasilkan wawasan yang berharga untuk pengembangan teori atau kebijakan.

Subjek penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan melibatkan 3 pengawas, 5 kepala sekolah, dan 22 guru di Gugus 9 Kabupaten Pidie. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang teliti. Observasi memberikan pemahaman langsung tentang situasi yang diamati, sementara wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dalam dari narasumber yang terlibat. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dari dokumen, catatan, atau arsip terkait.

Data dianalisis menggunakan model Hubberman & Miles (1994) yang melibatkan tiga tahap utama: pertama, reduksi data dilakukan untuk mengorganisir data yang terkumpul, mengidentifikasi pola atau tema yang muncul, dan mempersempit fokus analisis. Kedua, penyajian data dilakukan dengan mengatur dan mengekspresikan temuan dalam bentuk naratif atau visual yang dapat dimengerti. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan untuk menarik kesimpulan yang informatif dan relevan terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Hasil

1. Jumlah Ideal Pengawas Berdasarkan Jumlah Sekolah

Menentukan jumlah ideal pengawas sangat penting karena pengawas memiliki peran krusial dalam memastikan kualitas pendidikan di sekolah. Jumlah pengawas yang

memadai dapat memastikan setiap sekolah mendapatkan pengawasan yang cukup intensif dan efektif, sehingga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah secara keseluruhan. Dengan jumlah yang tepat, pengawas dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru dan kepala sekolah dalam menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang kompleks saat ini. Dampak dari kekurangan pengawas terhadap mutu pendidikan sangat signifikan. Kekurangan pengawas dapat mengakibatkan pembagian tugas yang tidak seimbang dan membebani pengawas yang ada dengan tanggung jawab yang berlebihan. Hal ini dapat mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif, penurunan kualitas pengajaran, serta kesulitan dalam mendeteksi dan menanggapi masalah yang muncul di sekolah. Dengan melakukan analisis terhadap jumlah ideal pengawas berdasarkan jumlah sekolah dan kondisi spesifik di Gugus 9 Kabupaten Pidie, dapat diidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dan mengadvokasi peningkatan jumlah pengawas yang sesuai. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sekolah mendapatkan pengawasan yang memadai demi meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Jumlah pengawas SD Gugus 9 kecamatan Geumpang, Mane, dan Tangse Kabupaten Pidie keseluruhan berjumlah 3 orang. Analisis jumlah ideal pengawas dilakukan berdasarkan jumlah sekolah, berdasarkan wawancara dengan "BY" pada tanggal 01 April 2024 didapatkan informasi bahwa jumlah pengawas SD di Gugus 9 kabupaten Pidie belum cukup. Rilis data dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Pidie khususnya Gugus 9 Kabupaten Pidie yakni berjumlah 48 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 503 orang. Berdasarkan rasio pengawas dan jumlah sekolah 1:10 ditambah satu orang pengawas Bimbingan Konseling, maka dapat dinyatakan bahwa jumlah ideal pengawas SD berdasarkan jumlah sekolah di Gugus 9 kabupaten Pidie adalah 4 pengawas sekolah ditambah 4 pengawas bimbingan Konseling. Dengan demikian jumlah tim pengawas untuk 48 sekolah adalah 8 orang. Namun demikian pada saat ini hanya ada 3 orang pengawas untuk 48 sekolah. Tentunya hal ini berarti terdapat kekurangan 5 orang pengawas. Untuk lebih jelas kebutuhan

Tabel 1. Jumlah Sekolah, Guru, dan Pengawas

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Pengawas	Jumlah Ideal Pengawas
1	Tangse	22	267	1	4
2	Mane	14	134	1	2
3	Geumpang	12	102	1	2
	Total	48	503	3	8

Tabel 1 menunjukkan distribusi sekolah, guru dan di Gugus 9. Jumlah pengawas di sekolah dasar Kabupaten Pidie tidak memenuhi standar ideal yang ditetapkan (1:16). Kekurangan ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan kinerja guru karena pengawas memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, evaluasi, dan

dukungan kepada guru dalam proses pembelajaran. Dengan jumlah pengawas yang kurang, pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah menjadi kurang intensif dan efektif, menghambat pengembangan profesionalisme guru dan implementasi kurikulum. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Pidie, diperlukan peningkatan jumlah pengawas sesuai standar yang ditetapkan, serta optimalisasi peran mereka dalam memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru dan sekolah.

2. Jumlah Ideal Pengawas Berdasarkan Kompetensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber, diperoleh informasi bahwa kompetensi pengawas SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, terutama di Gugus 9, secara umum masih belum memadai karena belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Kompetensi para pengawas dinilai dari partisipasi mereka dalam program pendidikan kepengawasan selama 161 jam yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Medan. Meskipun telah mengikuti pelatihan ini, masih terdapat tantangan dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh ke dalam praktek pengawasan sehari-hari di sekolah-sekolah dasar di Pidie. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan lanjutan dalam mengembangkan kompetensi pengawas agar dapat secara efektif memenuhi tugas-tugas pengawasan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang pada gilirannya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Menurut informasi dari narasumber ABD dan RSW, salah satu indikator kompetensi pengawas sekolah adalah melalui Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS). Mereka menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada pengawas di Kabupaten Pidie, terutama di Gugus 9, yang telah mengikuti UKPS. Hal ini disebabkan karena saat UKPS dilaksanakan pada tahun 2023, belum ada pengawas yang memiliki sertifikat sebagai pengawas profesional. Sebagian besar pengawas hanya memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional dan oleh karena itu mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2023. Karena tidak adanya pengawas yang memiliki sertifikat sebagai pengawas profesional, maka tidak ada hasil UKPS 2023 yang tersedia untuk Kabupaten Pidie, khususnya di Gugus 9. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan jumlah pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar pengawasan di tingkat sekolah dasar dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah tersebut.

Sebagai pembandingan, data hasil UKPS Kabupaten Pidie khususnya Gugus 9 terlihat bahwa nilai rata-rata UKPS Kabupaten Pidie khususnya Gugus 9 sebesar 55,40. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas sekolah belum memiliki kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Angka ini merupakan rata-rata dari dimensi kompetensi supervisi akademik sebesar 44,98, dimensi kompetensi supervisi manajerial sebesar 45,78, kompetensi evaluasi pendidikan sebesar 38,37, dan kompetensi penelitian dan pengembangan sebesar 40,75, sedangkan untuk dua kompetensi lainnya yaitu kompetensi sosial dan kepribadian pada UKPS ini tidak dimasukkan.

Menurut Permendikbudristek no.29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, Pamong Belajar, Penilik/Pengawas sekolah, nilai rata-rata minimal adalah 70 untuk setiap jenjang; SD, SMP, dan SMA/SLTA. Nilai minimal kelulusan tersebut diperoleh dari akumulasi bobot nilai akhir dari nilai rata-rata materi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Perhitungan bobot perhitungan materi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural berjumlah 30% dari keseluruhan kompetensi yang diuji.

Penilaian kompetensi pengawas juga dilakukan melalui penilaian-penilaian kinerja pengawas sekolah (PKPS) yang pada akhirnya akan dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Semua ASN akan mendapatkan SKP setiap tahun. Menanggapi hal ini "RSW" menyatakan bahwa SKP untuk para pengawas Kabupaten Pidie dikeluarkan pada akhir tahun. Mengenai hubungan tinggi rendahnya pangkat/golongan dan jabatan dengan kompetensi pengawas, ABD dan RSW menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Jabatan dan pangkat/golongan dengan masa kerja dan motivasi pengawas dalam menyusun kenaikan pangkatnya. Tiga pengawas yang diwawancarai bertugas sebagai pengawas sekolah dengan tugas pada kecamatan tertentu, sedangkan satu pengawas menyatakan sebagai pengawas mata pelajaran (Pendidikan Agama/Pendidikan Olahraga). Pengawas sekolah tidak bisa melakukan kepengawasan akademik secara baik terhadap guru-guru dengan latar belakang berbeda yaitu adanya guru mata pelajaran seperti pendidikan agama dan pendidikan olahraga.

Hasil ini berbanding lurus dengan hasil wawancara dengan 2 orang guru di tiap sekolah yang menyatakan bahwa secara umum sulit mengukur kompetensi pengawas karena umumnya pengawas tidak memberikan bimbingan akademik. Bimbingan yang diberikan pengawas umumnya adalah bimbingan umum secara klasikal.

Berdasarkan triangulasi terhadap pernyataan para narasumber dengan hasil studi dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa belum ditemukan penilaian kompetensi pengawas 2023. Pernyataan ABD bahwa kompetensi pengawas baik berdasarkan pada 85% pengawas telah lulus pendidikan dan pelatihan 161 jam yang diadakan oleh LPMP Kabupaten Pidie. Sementara Penilaian kinerja pengawas 2024 belum diperoleh data karena penilaian dilakukan antara Januari-Desember 2024. Pangkat/golongan dan jabatan pengawas tidak mencerminkan tinggi rendahnya kompetensi pengawas. Bagi para guru kompetensi pengawas sulit diukur karena mayoritas tidak berjumpa secara personal dalam kepengawasan akademik.

3. Kebutuhan Pengawas SD di Kabupaten Pidie Berdasarkan Rasio Guru

Berdasarkan hasil wawancara, terungkap bahwa saat ini di Kabupaten Pidie Gugus 9 terdapat 3 orang pengawas yang bertugas mengawasi 48 sekolah dasar dengan total 503 guru. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kebanyakan informan menganggap jumlah 3 pengawas SD sudah cukup dan memadai. Sebagai contoh, dalam wawancara dengan TA dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, disebutkan bahwa

pengawas SD di Gugus 9 dianggap sudah memadai dan tersebar secara merata di seluruh gugus. Hal ini menegaskan bahwa setiap sekolah di Gugus 9 telah memiliki pengawas yang dianggap ideal. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa persepsi mengenai kecukupan jumlah pengawas dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan kriteria yang digunakan. Perbedaan pendapat ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai kebutuhan pengawasan di setiap sekolah dan wilayah. Oleh karena itu, evaluasi berkala tentang distribusi dan kapasitas kerja pengawas perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan efektivitas pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan yang optimal di Kabupaten Pidie, khususnya di Gugus 9.

Wawancara dengan AD Staf bagian tenaga kependidikan tingkat SD di Kabupaten Pidie mengungkapkan bahwa pengawas SD di Gugus 9 dianggap sudah mencukupi, dengan 48 SD dan 3 pengawas. Menurut hasil wawancara tersebut, jumlah ini dianggap memadai mengingat jumlah guru mencapai 503 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan di SD Gugus 9 dianggap sudah ideal. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat bahwa pengawas SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie dianggap memadai dan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di daerah tersebut.

Narasumber ABW Kabag Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa meskipun jumlah pengawas SD di Gugus 9 belum mencukupi, kekurangan ini telah diatasi dengan memberdayakan pengawas yang sudah ada sehingga dianggap memadai. Oleh karena itu, menurut narasumber, tidak perlu menambah jumlah pengawas karena mereka sudah dianggap layak untuk memenuhi tugas pengawas dengan baik. Situasi ini tidak berdampak negatif terhadap peningkatan mutu pendidikan di tingkat SD di Kabupaten Pidie, khususnya di Gugus 9. Hasil wawancara dengan CY, juga menegaskan bahwa jumlah pengawas SD di Kabupaten Pidie, terutama di Gugus 9, sudah dinilai mencukupi. Jumlah pengawas yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan kondisi setiap gugus di daerah masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan pengawas sekolah dasar di Gugus 9 Kabupaten Pidie masih belum terpenuhi, meskipun ada pandangan dari beberapa informan yang menyatakan bahwa rasio pengawas sudah cukup. PP No. 74/2008 dan (Mulyasa, 2017) menetapkan bahwa idealnya, satu pengawas sekolah dasar seharusnya bertanggung jawab terhadap 10 sekolah dan sekitar 70 guru. Namun, dengan hanya 3 pengawas untuk 48 sekolah dan 503 guru di Gugus 9, ini menunjukkan bahwa proporsi pengawas belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. (Siti Afina Anandha, Belina Dwi Nurlinda, Tantri Hertika Lestari, 2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa peningkatan keahlian seorang pendidik dapat dilihat dari persentase frekuensi variabel pengembangan profesi guru. Berdasarkan analisis komparatif dengan daerah lain yang memiliki kondisi serupa yaitu Bau-Bau yang menghadapi tantangan yang serupa menunjukkan bahwa pengawas sekolah memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja guru (Mahmudi & Bungsu, 2023).

Melihat jumlah SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie hanya 3 orang, maka dinas pendidikan kabupaten Pidie mempunyai kebijakan bahwa pengawas SD mengikuti rasio pengawas 1:10, tetapi tidak menyediakan pengawas di bidang Bimbingan konseling karena bidang tersebut ditangani oleh pengawas reguler atau pengawas sekolah biasa. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh bahwa jumlah pengawas dengan sekolah dan guru binaannya masih belum ideal karena terlihat masih ada satu orang pengawas yang membina lebih dari 10 sekolah seperti yang terjadi di kecamatan Tangse yakni jumlah sekolah SD adalah sebanyak 22 unit. Tentu jumlah ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah disebutkan di atas. Selain itu, pengawas untuk guru BK bahkan belum ada sama sekali. Jumlah ideal pengawas berdasarkan jumlah guru yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel berikut. Oleh karena itu, diharapkan dalam melakukan rekrutmen calon pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, sebagai *stakeholder* harus mempertimbangkan kebutuhan ideal sesuai dengan analisis kebutuhan pengawas SD di Kabupaten Pidie khususnya Gugus 9. Hasil studi dokumentasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie tanggal 23 April 2024 dan daftar urut kepangkatan pengawas sekolah Kabupaten Pidie, SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie baru memiliki 3 pengawas yang termasuk dalam jabatan muda dengan golongan III/d.

Jumlah tenaga pendidik per sekolah berdasarkan data dokumen dari staf Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Guru kelas dan Mata Pelajaran Per Sekolah

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru Kelas	Jumlah Guru Mapel	Jumlah Pengawas
1	Tangse	22	241	21	1
2	Mane	14	119	12	1
3	Geumpang	12	90	10	1
	Total	48	450	43	3

Tabel 2 menunjukkan distribusi jumlah guru kelas dan mata Pelajaran per sekolah. Jumlah guru kelas yaitu 450 orang, dan guru mata pelajaran orang sebanyak 43 orang. Jika digunakan aturan PPNo.74/2008 yang menyatakan bahwa rasio pengawas SD adalah 1 orang pengawas untuk 10 sekolah maka jumlah pengawas yang dibutuhkan untuk sekolah di kecamatan Tangse sebanyak dua orang pengawas ditambah satu orang pengawas BK. Sementara untuk pengawas sekolah di kecamatan Mane sebanyak 1 orang pengawas ditambah satu orang pengawas BK dan untuk kecamatan Geumpang dibutuhkan satu orang pengawas ditambah satu orang pengawas BK. Dengan demikian jumlah pengawas yang dibutuhkan berdasarkan jumlah sekolah adalah 8 orang. Namun kenyataannya saat ini jumlah pengawas yang ada sekarang hanya 3 pengawas. Oleh karena Gusu 9 Kabupaten Pidie masih membutuhkan 5 pengawas SD.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pengawas sekolah dasar di Gugus 9 Kabupaten Pidie belum memenuhi standar yang ideal berdasarkan jumlah sekolah. Berdasarkan rasio 1:10 untuk 48 sekolah di Gugus 9, idealnya Pidie seharusnya memiliki 8 pengawas untuk mengawasi seluruh sekolah. Dalam konteks ideal, setiap kelompok 10 sekolah seharusnya didampingi oleh 2 pengawas. Kekurangan pengawas ini berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan mutu guru secara keseluruhan. Pengawas sekolah memegang peran kunci dalam memberikan bimbingan, evaluasi, dan dukungan kepada guru dalam proses pembelajaran. Dengan jumlah pengawas yang kurang, pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah menjadi kurang intensif dan efektif. Hal ini dapat menghambat pengembangan profesionalisme guru dalam menerapkan metode mengajar yang inovatif. Selain itu, pengawasan yang tidak memadai juga dapat mengakibatkan kurangnya pemantauan terhadap implementasi kurikulum dan kebijakan pendidikan nasional, yang berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan di Gugus 9 Kabupaten Pidie secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan analisis lebih lanjut dan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah pengawas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pengawasan pendidikan di tingkat dasar dapat diperkuat, sehingga memberikan dukungan yang lebih baik kepada guru dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang kompleks di Kabupaten Pidie.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Niswanto, 2016) menemukan bahwa pembinaan pengawas pendidikan perlu dimulai dengan melakukan kajian terhadap kebutuhan pengawas sekolah dasar melalui perencanaan yang rasional dengan melibatkan stakeholders dalam suatu koordinasi yang sinergi untuk meningkatkan kinerja pengawas. Lebih lanjut (Sariakin & Nora Fitria, 2023) menemukan bahwa supervisi atau pengawasan perlu dilakukan di sekolah dasar untuk meningkatkan efektivitas sekolah.

Pernyataan di atas didukung oleh Nurochmah & Bachtiar (2016) yang mengemukakan bahwa analisis kebutuhan pengawas sekolah dasar berdasarkan jumlah sekolah merupakan langkah penting dalam memastikan setiap sekolah memiliki pengawas yang memadai untuk mengawasi proses pendidikan dan pengelolaan sekolah dengan efektif. Analisis ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap rasio antara jumlah sekolah dengan jumlah pengawas yang tersedia, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi pendidikan yang berlaku. Proses rekrutmen pengawas sekolah dasar seharusnya didasarkan pada hasil analisis kebutuhan ideal pengawas berdasarkan jumlah sekolah, bukan hanya bergantung pada ketersediaan pengawas saat ini. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan pengawasan sekolah dasar dapat lebih terencana, terukur, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh di tingkat lokal. Langkah-langkah ini menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan pendidikan dan memastikan bahwa setiap sekolah dapat berfungsi optimal dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa pemerintah kabupaten Pidie menyatakan bahwa jumlah pengawas yang ada saat ini telah cukup. Namun demikian perlu dianalisis kebutuhan idealnya pengawas berdasarkan PPNo.74/2008 menyatakan bahwa rasio pengawas SD adalah 1 orang pengawas untuk 10 sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi pengawas Sekolah/madrasah dapat disimpulkan kompetensi pengawas terdiri atas enam, yakni kompetensi: (1) kepribadian, (2) supervisi manajerial, (3) supervisi akademik, (4) evaluasi pendidikan, (5) penelitian dan pengembangan, dan (6) sosial. Pengawas sekolah melaksanakan penjaminan mutu dan memberdayakan kepala sekolah dan guru di sekolah binaannya.

Kompetensi utama pengawas sekolah tersebut lebih jauh diperinci lagi berdasarkan jabatannya, yakni kompetensi pengawas muda, kompetensi pengawas madya, dan kompetensi pengawas utama. Kompetensi pengawas SD Kabupaten Pidie khususnya gugus 9 berdasarkan jabatan dan golongan idealnya menurut (Sudjana, 2017) adalah 10%-20% pengawas muda, 40%-60% pengawas madya, dan 20%-40% pengawas utama. Berdasarkan kelompok usianya, komposisi ideal pengawas SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie adalah 40% berusia di bawah 45 tahun, 50% berusia antara 45 tahun sampai dengan 50 tahun, dan 10% saja pengawas yang berusia lebih dari 50 tahun. Berhubung jumlah pengawas SD di Gugus 9 hanya 3 orang, maka idealnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie mempunyai kebijakan bahwa pengawas SD pada guru kelas, rasio pengawas lebih kurang 1:70.

Pengawas untuk jenjang SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie berdasarkan rasio sekolah memiliki 3 orang pengawas sekolah. Sementara kebutuhan pengawas sesuai dengan jumlah sekolah dan guru adalah 8 orang pengawas. Rincian kebutuhan pengawas ideal SD gugus 9 Kabupaten Pidie adalah 1 orang pengawas guru kelas pada setiap 10 sekolah ditambah 1 orang pengawas BK. Berhubung jumlah sekolah di SD Gugus 9 sebanyak 48 unit satuan maka jumlah ideal pengawas yang dibutuhkan adalah 4 orang untuk pengawas guru kelas ditambah 4 orang pengawas BK sehingga jumlah ideal seluruh pengawas SD untuk gugus 9 Kabupaten Pidie adalah 8 orang. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah pengawas SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie hanya 3 orang, maka kekurangan pengawas SD di gugus tersebut adalah 5 orang dengan rincian jumlah sekolah yang ada adalah 48 unit satuan dengan jumlah guru 503 orang maka pengawas yang dibutuhkan adalah sebanyak 8 orang. Dengan demikian jumlah pengawas ideal SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie kekurangan 5 orang. Kekurangan tersebut harus terpenuhi untuk pengembangan rencana sumber daya manusia. Gugus 9 saat ini memiliki tiga orang pengawas sekolah dasar. Dengan demikian, berdasarkan jumlah sekolah yang ada, diperlukan satu orang pengawas sekolah dasar tambahan serta empat orang pengawas

bimbingan dan konseling. Gugus 9 Kabupaten Pidie saat ini menghadapi kebutuhan mendesak untuk merekrut lima pengawas baru guna memenuhi standar yang ditetapkan, yakni satu orang pengawas untuk setiap 10 sekolah serta kebutuhan tambahan pengawas bimbingan dan konseling. Dengan adanya kekosongan ini, pengelolaan pendidikan di Gugus 9 Kabupaten Pidie dapat mengalami kendala dalam pengawasan yang efektif terhadap proses pembelajaran dan manajemen sekolah secara keseluruhan.

(Sadili Samsudin, 2015) mengemukakan, suatu perencanaan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dan menggunakan asumsi-asumsi untuk masa depan sehingga sasaran atau tujuan yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan. Perencanaan sumber daya manusia harus memperhatikan hal-hal berikut: (1). Mengumpulkan informasi secara reguler dan terus menerus. (2). Menganalisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia masa kini dan masa akan datang. (3). Mengumpulkan hasil analisis sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. (4). Memanfaatkan sumber daya manusia menurut jabatan dan kualitasnya. (5). Melaksanakan monitoring secara terus-menerus terhadap kebijakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian. (5). Mengintegrasikan perencanaan sumber daya manusia dalam suatu perencanaan manajemen sumber daya manusia.

Peran pengawas harus dilaksanakan secara efektif agar kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dapat diperbaiki melalui kolaborasi dan semangat untuk mencapai tujuan mulia Negara, yakni meningkatkan kecerdasan anak bangsa (Badani et al., 2020). Kekurangan pengawas berdasarkan rasio satuan pendidikan tentu akan berakibat pada kualitas guru-guru SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie. Oleh karena itu, diharapkan dalam melakukan rekrutmen calon pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie, sebagai *stakeholder* yang baru, dengan mempertimbangkan kebutuhan ideal sesuai dengan analisis kebutuhan pengawas SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie.

Pengawas di sekolah sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengajaran di sekolah oleh guru-guru (Erwiati, dkk., 2022). Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama untuk melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan membimbing para pendidik di lembaga pendidikan yang telah mereka tunjuk. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka pemerintah berdasarkan Permen PAN Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2002 tentang jabatan fungsional dan Pengawas Sekolah, sebab Pengawas Sekolah adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan lebih efektif (Rahmah, 2018).

Pengawasan SD di Gugus 9 Kabupaten Pidie masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari profil pengawas yang ada, komposisi ideal pengawas berdasarkan jumlah sekolah, jumlah guru rumpun mata pelajaran, kompetensi dan perbandingan antara

kondisi aktual dengan jumlah ideal pengawas SD berdasarkan satuan pendidikan maupun mata pelajaran. Data dan informasi hasil analisis kebutuhan pengawas SD serta pendistribusiannya ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Khususnya Gugus 9 dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengawas SD serta distribusi ideal di setiap Gugus Kabupaten Pidie tersebut sesuai dengan kriteria-kriterianya.

Sejalan dengan hasil tersebut, Iskandar (2017) menemukan bahwa dalam pengawas pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melihat hal ini, maka sangat penting memenuhi kebutuhan pengawas yang sesuai pada setiap sekolah. Analisis kebutuhan pengawas sekolah dasar di Kabupaten Pidie menunjukkan adanya kekurangan pengawas di beberapa sekolah, yang berpotensi menghambat pengawasan yang efektif terhadap proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Implikasi utama dari temuan ini adalah perlunya peningkatan jumlah pengawas sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti rasio 1 pengawas untuk setiap 10 sekolah, sesuai Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008. Dengan peningkatan ini, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran dapat lebih intensif dan berkualitas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya redistribusi pengawas secara merata di seluruh wilayah Gugus 9 Kabupaten Pidie, agar setiap sekolah mendapatkan dukungan pengawasan yang seimbang, termasuk di daerah pedesaan atau terpencil. Implikasi lainnya adalah perlunya peningkatan kompetensi pengawas melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkala, untuk memastikan mereka mampu memberikan bimbingan yang efektif kepada guru dan menerapkan metode pembelajaran inovatif sesuai kebutuhan siswa. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah, distribusi merata, dan peningkatan kompetensi pengawas sekolah dasar di Kabupaten Pidie adalah langkah krusial dalam mendukung efektivitas pengelolaan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik untuk semua siswa di wilayah tersebut.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah pengawas sekolah dasar di Gugus 9 Kabupaten Pidie belum mencapai standar ideal yang ditetapkan, baik berdasarkan rasio pengawas satuan pendidikan maupun berdasarkan jumlah guru kelas. Terdapat kekurangan satu orang pengawas satuan pendidikan dan empat orang pengawas bimbingan konseling. Disarankan untuk meningkatkan jumlah pengawas dan menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan profesionalisme pengawas sekolah dasar di Kabupaten Pidie dengan merancang program pengembangan kompetensi. Program ini mencakup pelatihan dan pengembangan profesional untuk memperkuat kualitas pengawasan di tingkat sekolah dasar. Penelitian ini juga membantu dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan

pendidikan, seperti implementasi kurikulum, manajemen sekolah, dan pembinaan tenaga pendidik. Temuan dan metodologi penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan kompetensi pengawas pendidikan atau topik terkait di berbagai wilayah.

Referensi

- Badani, B., Mustafa, M. N., & Faizah AR, H. (2020). Peranan Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SDN di Kecamatan Rumbio Jaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.31258/jmppk.4.1.p.19-26>
- Erwiati, Hajani, Sabar Padang, Suhardi Aceh, Y. (2022). Peran Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(3), 185–195. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i3.12660>
- Hubberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis*.
- Husaini Usman. (2019). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (4th ed.). Bumi Aksara.
- Iskandar, D. (2017). Peran Pengawas Pendidikan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Smp Di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 9(2), 179. <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v9i2.12918>
- Mahmudi, F. Al, & Bungsu, A. P. (2023). *Kontribusi Pengawas Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru Tk Di Kota Baubau*. 2(1), 166–175.
- Mulyasa, E. (2017). *Revolusi Mental Dalam Pendidikan*. Rosda Karya.
- Mulyasa, H. E. (2017). *Penelitian Tindakan Sekolah*. Rosda Karya.
- Nana Sudjana. (2017). *Pengawas dan Kepengawasan: Memahami Tugas Pokok fungsi, Peran dan Tanggung Jawab Pengawas Sekolah*. Binamitra Publishing.
- Niswanto, N. (2016). Manajemen Pembinaan Pengawas Sekolah Dasar (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i2.3429>
- Nur Aedi. (2018). *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Rajawali Press.
- Nurochmah, A., & Bachtiar, M. (2016). Analisis Kebutuhan Untuk Peningkatan Mutu Kinerja Pengawas Sekolah Di Makassar. *Publikasi Pendidikan*, VI.
- Rahmah, S. (2018). Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2). <https://doi.org/10.30829/tar.v25i2.378>
- Sadili Samsudin. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (3rd ed.). Pustaka Setia.
- Sariakin, & Nora Fitria. (2023). *Pelaksanaan Supervisi Terhadap Efektivitas Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh*. 4(1), 209–218.
- Sariakin, Yulsafli, & Rahmattullah. (2023). Pengaruh Pelaknasanaan Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran. *NUSRA: Jurnal*

Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 4(4), 828–835.
<https://doi.org/10.55681/nusra.v4i4.1635>

Siti Afina Anandha, Belina Dwi Nurlinda, Tantri Hertika Lestari, R. S. (2022). Pengaruh Pengembangan Profesi Guru Terhadap Peningkatan Kinerja Guru. *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>

Sondang Siagian. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bina Aksara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wiratman, A. (2021). Peranan Pengawas Dalam Meningkatkan Mutu Pengelolaan Sekolah Dasar. *Jurnal Konsepsi*, 10(2), 106–112.